



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)
Accredited No. 30/E/KPT/2019
DOI: <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v8i2.19283>
Volume 8, No. 2, 2023 (1228-1246)

ANALISIS DESKRIPTIF MENGENAI PENDAPATAN DAN PENGELUARAN PUBLIK DALAM KEBIJAKAN FISKAL

Ahmad Fuadi, Raju Adha, Patma Wati, Isnaini Harahap

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ahmadfuaditj@gmail.com, adhanasution018@gmail.com, fwatikdr@gmail.com
isnaini.harahap@uinsu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sederhana tentang konsep kebijakan fiskal, pendapatan publik, dan pengeluaran publik. Dalam konteks ini, pemahaman tentang kebijakan fiskal penting untuk memahami bagaimana pemerintah mengelola ekonomi dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pendapatan publik menjadi sumber dana yang digunakan pemerintah untuk menjalankan berbagai program dan layanan publik, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Pengeluaran publik mencakup alokasi dana untuk tujuan-tujuan ini. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memiliki pemahaman dasar yang kuat tentang peran dan pentingnya kebijakan fiskal dalam mengatur ekonomi dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci : Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Pengeluaran Publik

Abstract

This study aims to provide a simple understanding of the concepts of fiscal policy, public revenue, and public spending. In this context, an understanding of fiscal policy is important to understand how the government manages the economy and meets people's needs. Public revenue is a source of funds used by the government to run various programs and public services, such as infrastructure, education, health and social welfare. Public spending includes the allocation of funds for these purposes. The method used is descriptive method. The results of this study are expected to have a strong basic understanding of the role and importance of fiscal policy in regulating the economy and meeting people's needs.

Keywords: Fiscal Policy, Income, Public Spending

1. Pendahuluan

Kebijakan fiskal adalah salah satu instrumen kebijakan ekonomi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur perekonomian suatu negara. Kebijakan fiskal meliputi dua aspek utama yaitu pendapatan publik dan pengeluaran. Pendapatan publik merujuk pada sumber-sumber pendapatan yang dimiliki oleh pemerintah, sedangkan pengeluaran mencakup berbagai program dan kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah (Imam Turmudi, 2019).

Dalam konteks kebijakan fiskal, pendapatan publik dan pengeluaran sangat penting. Pendapatan publik yang mencakup pajak, penerimaan dari sumber daya alam, dan berbagai sumber pendapatan lainnya, digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai program dan kegiatan publik seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Sementara itu, pengeluaran pemerintah pada program-program tersebut, diharapkan dapat memberikan dampak positif pada perekonomian dan masyarakat secara keseluruhan. Pendapatan publik merupakan salah satu sumber keuangan utama pemerintah dalam menjalankan program-program publiknya. Sumber pendapatan ini berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak, penerimaan dari sumber daya alam, dan sumber-sumber pendapatan lainnya. Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah, dan biasanya digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat (Najicha, 2022).

Selain pajak, penerimaan dari sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, dan tambang juga merupakan sumber pendapatan penting bagi negara-negara yang memiliki sumber daya alam tersebut (Rahma et al., 2021). Pemerintah dapat memanfaatkan sumber pendapatan ini untuk membiayai program dan kegiatan yang berhubungan dengan sektor energi dan lingkungan. Sumber-sumber pendapatan lainnya seperti bunga pinjaman dan dividen dari investasi juga dapat menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah. Namun, pemerintah harus memastikan bahwa penggunaan sumber-sumber pendapatan tersebut sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.

Pengeluaran pemerintah mencakup berbagai program dan kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah. Program-program ini dapat berkisar dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, keamanan dan pertahanan, serta program-program sosial lainnya. Pengeluaran pemerintah juga dapat berupa pembelian barang dan jasa dari sektor swasta, yang dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Pemerintah harus memperhatikan keseimbangan antara pendapatan publik dan pengeluaran dalam kebijakan fiskalnya. Jika pengeluaran pemerintah melebihi pendapatan publik, maka akan terjadi defisit anggaran yang dapat menyebabkan masalah fiskal jangka panjang bagi negara.

Sebaliknya, jika pendapatan publik melebihi pengeluaran, maka akan terjadi surplus anggaran yang dapat digunakan untuk membayar utang atau mengalokasikan dana untuk program dan kegiatan lainnya. Pengaturan pendapatan publik dan pengeluaran pemerintah sangat penting dalam mencapai tujuan makroekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi yang stabil, inflasi yang terkendali, dan lapangan kerja yang cukup. Selain itu, pengelolaan kebijakan

fiskal juga dapat berdampak pada distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks kebijakan fiskal, pemerintah harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi global dan domestik, pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta kebijakan moneter. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kebijakan fiskal yang tepat dan efektif dalam mencapai tujuan makroekonomi. Dalam rangka memaksimalkan potensi pendapatan publik dan pengeluaran pemerintah, pemerintah harus memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik, memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal, serta meningkatkan partisipasi publik dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Dalam kesimpulannya, pendapatan publik dan pengeluaran pemerintah merupakan dua aspek penting dalam kebijakan fiskal. Pengaturan yang tepat dan efektif dalam dua aspek ini dapat membantu mencapai tujuan makroekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan pengelolaan keuangan publik yang transparan, akuntabel, dan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

2. Kajian Pustaka

a. Pemerintah dan Ekonomi

Pemerintah dan ekonomi berperan penting dalam kebijakan fiskal, yaitu kebijakan yang berkaitan dengan pengeluaran dan penerimaan negara untuk mempengaruhi perekonomian suatu negara. Pemerintah dan ekonomi berperan penting dalam kebijakan fiskal karena kebijakan ini berkaitan dengan pengeluaran dan penerimaan negara yang dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara. Pemerintah sebagai pengelola keuangan negara dapat mengubah pengeluaran dan penerimaan negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi. Sementara itu, ekonomi memberikan informasi tentang kondisi ekonomi negara yang membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan fiskal yang tepat dan efektif.

Secara singkat, peran pemerintah dalam kebijakan fiskal adalah sebagai pengelola keuangan negara yang berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi dengan memanipulasi pengeluaran dan penerimaan negara. Mengendalikan inflasi dengan memanipulasi pengeluaran dan penerimaan negara adalah upaya pemerintah untuk menstabilkan tingkat harga di dalam perekonomian dengan cara mengubah pengeluaran dan penerimaan negara. Pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan fiskal seperti peningkatan pengeluaran publik untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi atau menurunkan pajak untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Di sisi lain, pemerintah juga dapat memperketat pengeluaran dan menaikkan pajak untuk menangani inflasi yang terjadi.

Sementara itu, ekonomi juga memainkan peran penting dalam kebijakan fiskal karena mempengaruhi keputusan pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Ekonomi memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi

negara, seperti tingkat pertumbuhan, inflasi, dan pengangguran. Data-data tersebut membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan fiskal yang tepat dan efektif. Secara ringkas, pemerintah dan ekonomi saling berhubungan dalam kebijakan fiskal dengan pemerintah sebagai pengelola keuangan negara dan ekonomi sebagai sumber informasi yang membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan (Putri & Nasution, 2022).

b. Sumber Pendapatan Negara

Sumber pendapatan negara dalam kebijakan fiskal adalah sumber-sumber yang digunakan oleh pemerintah untuk mendapatkan pendapatan guna membiayai kegiatan pemerintah dan program-program publik. Pendapatan ini dapat berasal dari berbagai sumber, seperti pajak, penerimaan perusahaan milik negara, pinjaman dari lembaga keuangan, dan lain-lain. Pendapatan negara adalah pemasukan negara yang digunakan sebagai sumber pendanaan kegiatan dan kebutuhan negara dalam rangka pembangunan negara. Yang dimaksud dengan pendapatan negara atau penerimaan uang negara atau penerimaan pemerintah yakni meliputi pajak, retribusi, keuntungan perusahaan negara, denda, sumbangan masyarakat, dll (Nida'ul Haque, 2022).

Di dalam kebijakan fiskal, pengelolaan sumber pendapatan negara sangat penting untuk menjamin kestabilan ekonomi negara dan untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi yang ditetapkan pemerintah. Pengelolaan sumber pendapatan negara harus dilakukan dengan cermat dan transparan, serta harus mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan pemerintah secara seimbang. Pemerintah menyediakan sejumlah layanan kepada warga negaranya dan pengunjung asing, memungut biaya atau harga yang sama. Contohnya adalah utilitas publik seperti layanan pos, pekerjaan imigrasi, penyediaan air dan listrik, dan penerbitan berbagai jenis lisensi dan sertifikasi. Di banyak negara, pemerintah menyediakan layanan komersial dan menjalankan perusahaan publik untuk mendapatkan keuntungan. Namun, sumber utama pengumpulan pendapatan adalah perpajakan (Nida'ul Haque, 2022). Meminjam di dalam atau di luar negeri dan mencetak nota untuk menutup defisit menjadi penting akhir-akhir ini. Pajak tidak hanya merupakan sumber pendapatan publik (pemerintah) yang paling penting, tetapi juga merupakan instrumen kebijakan untuk mengarahkan sumber daya ke penggunaan yang diinginkan.

Pajak adalah sumber pendapatan negara yang paling umum digunakan dalam kebijakan fiskal. Pemerintah dapat memungut pajak dari berbagai jenis, seperti pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak properti, dan pajak lainnya. Pemerintah juga dapat memperoleh pendapatan dari perusahaan milik negara, seperti perusahaan listrik, air minum, dan transportasi. Untuk mempersempit kesenjangan pendapatan dan kekayaan, dan untuk mengurangi kemiskinan. Pajak adalah pembayaran uang wajib yang dilakukan kepada pemerintah oleh orang-orang tanpa manfaat kompensasi langsung yang diperoleh mereka. Hal ini berbeda dengan biaya atau harga yang dibayarkan sebagaimana dinyatakan untuk manfaat langsung dan proporsional yang diterima. Pajak bersifat kontribusi umum terhadap pendapatan pemerintah untuk memenuhi pengeluaran yang dikeluarkan atas penyediaan dan pemeliharaan pelayanan yang diberikan

pemerintah kepada masyarakat; pemeliharaan ketertiban dan keamanan dan kesiapan pertahanan menjadi contoh utama. Jumlah yang harus dibayarkan ditentukan baik sebagai jumlah tertentu atau sebagai persentase dari beberapa variabel seperti pendapatan, kekayaan, atau rejeki tak terduga.

c. Teori Perpajakan

Adam Smith dalam *Wealth of Nations* (1776) telah meletakkan beberapa prinsip dasar perpajakan. Yang utama adalah bahwa setiap orang harus memberikan pajak kepada pemerintah sesuai dengan kemampuannya untuk membayar. Teori perpajakan adalah konsep yang digunakan dalam kebijakan fiskal untuk memahami prinsip-prinsip dan tujuan dari pajak sebagai sumber pendapatan negara. Teori perpajakan dapat digunakan untuk merancang sistem perpajakan yang adil dan efektif, serta memastikan bahwa pajak dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi perekonomian dan masyarakat.

Beberapa teori perpajakan yang umum digunakan dalam kebijakan fiskal antara lain:

1. Teori keadilan: Menurut teori ini, pajak harus didistribusikan secara adil di antara masyarakat dan harus memberi manfaat kepada seluruh rakyat, tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Dalam hal ini, pajak dapat digunakan untuk memperkecil kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Teori efisiensi: Teori ini menekankan bahwa pajak harus meminimalkan distorsi ekonomi dan memaksimalkan efisiensi ekonomi. Dalam hal ini, pajak harus dirancang untuk mengurangi dampak negatif pada pasar dan aktivitas ekonomi, serta meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi.
3. Teori elastisitas: Teori ini mengasumsikan bahwa perubahan harga pajak akan berdampak pada perubahan permintaan dan penawaran di pasar. Dalam hal ini, pajak harus dirancang dengan mempertimbangkan tingkat elastisitas permintaan dan penawaran, sehingga perubahan pajak tidak mengurangi jumlah barang dan jasa yang diproduksi atau dikonsumsi oleh masyarakat.
4. Teori penerimaan pajak: Teori ini menekankan pentingnya pendapatan pajak bagi pemerintah dan ekonomi nasional. Dalam hal ini, pajak harus dirancang untuk memaksimalkan penerimaan pajak dengan mempertimbangkan kebijakan dan kepentingan nasional, seperti pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam mengimplementasikan teori perpajakan, pemerintah harus mempertimbangkan aspek-aspek lain seperti kebijakan fiskal yang berkelanjutan dan adil, serta pertimbangan politik dan sosial. Selain itu, perubahan peraturan perpajakan harus dilakukan dengan hati-hati dan setelah mempertimbangkan dampaknya pada masyarakat dan perekonomian. Orang yang kurang mampu tidak selalu wajib membayar pajak. Dalam sistem perpajakan yang adil, pajak biasanya diterapkan secara progresif, yaitu semakin tinggi penghasilan seseorang, semakin tinggi pula tarif pajak yang dikenakan. Dengan demikian, orang yang penghasilannya rendah atau kurang mampu biasanya dikenakan

pajak yang lebih rendah atau bahkan dibebaskan dari kewajiban membayar pajak.

Namun, ada beberapa jenis pajak seperti pajak penjualan atau pajak pertambahan nilai (PPN) yang dikenakan pada barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat, termasuk orang yang kurang mampu. Meskipun tarif PPN biasanya sama untuk semua orang, pemerintah seringkali memberikan keringanan pajak atau insentif pajak untuk barang-barang tertentu yang dibeli oleh orang yang kurang mampu, seperti beras, minyak goreng, dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya. Selain itu, dalam beberapa kasus, orang yang kurang mampu juga dapat menerima bantuan sosial dari pemerintah, yang dapat membantu mengurangi beban pajak atau biaya hidup lainnya. Program bantuan sosial ini dapat berupa tunjangan sosial, subsidi, atau program-program kesejahteraan lainnya yang bertujuan untuk membantu kelompok-kelompok yang membutuhkan.

Dalam kesimpulannya, orang yang kurang mampu tidak selalu wajib membayar pajak, tergantung pada jenis pajak dan sistem perpajakan yang diterapkan di negara tersebut. Namun, meskipun tidak wajib membayar pajak, orang yang kurang mampu masih dapat terkena beban pajak dalam beberapa bentuk, dan oleh karena itu pemerintah perlu memberikan bantuan sosial yang sesuai untuk membantu mengurangi beban keuangan yang mereka hadapi.

d. Karakteristik Sistem Pajak Yang Baik

Ada banyak cara untuk menyusun sistem pajak. Pertanyaan tentang apa secara umum kualitas dasar yang harus dimiliki oleh sistem perpajakan yang baik menjadi penting. Berikut ini sering ditunjukkan untuk panduan. Penekanan relatif dapat bervariasi dan penambahan dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan lokal.

1. Adil dan Merata: Kontribusi individu terhadap penerimaan pajak harus tidak diskriminatif dan adil. Ini berarti bahwa pembayar pajak dengan kondisi keuangan yang sama harus membayar jumlah yang sama, dan pembayar pajak yang lebih mampu harus membayar setidaknya proporsi pendapatan pajak yang sama dengan mereka yang kurang mampu. Keadilan dalam pengertian terakhir mengarah pada pengklasifikasian pajak sebagai regresif, proporsional, atau progresif.

Pajak regresif: Contoh sederhana dari pajak regresif adalah pajak penjualan atau VAT (Value Added Tax). Dalam pajak ini, tarif pajaknya sama untuk semua orang yang membeli barang atau jasa, sehingga orang yang memiliki penghasilan lebih rendah akan membayar persentase pajak yang lebih besar dari penghasilannya daripada orang kaya. Sebagai contoh, jika tarif pajak VAT adalah 10%, seseorang yang membeli barang senilai Rp 100.000 akan membayar Rp 10.000 pajak (10% dari harga barang). Namun, jika seseorang yang membeli barang senilai Rp 1.000.000, ia hanya akan membayar Rp 100.000 pajak (juga 10% dari harga barang), yang merupakan persentase yang jauh lebih rendah dari

pendapatannya. Hal ini menunjukkan bahwa pajak VAT lebih memberatkan bagi orang yang memiliki penghasilan lebih rendah, sehingga dapat dianggap sebagai pajak regresif.

Pajak proporsional: Pajak proposional adalah sistem perpajakan di mana tarif pajaknya sama untuk semua wajib pajak, tidak peduli seberapa besar penghasilan atau kemampuan finansial mereka. Artinya, setiap wajib pajak membayar persentase yang sama dari pendapatannya sebagai pajak. Contoh sederhana dari pajak proposional adalah pajak penghasilan dengan tarif flat rate. Misalnya, jika tarif pajak penghasilan adalah 10%, maka setiap wajib pajak harus membayar 10% dari pendapatannya sebagai pajak, tanpa memperhitungkan berapa besar pendapatannya. Sebagai contoh, jika seseorang memiliki penghasilan sebesar Rp 50 juta per tahun, maka dia harus membayar pajak sebesar Rp 5 juta ($10\% \times \text{Rp } 50 \text{ juta}$). Sementara, jika seseorang memiliki penghasilan sebesar Rp 500 juta per tahun, maka dia harus membayar pajak sebesar Rp 50 juta ($10\% \times \text{Rp } 500 \text{ juta}$). Dalam pajak proposional, setiap wajib pajak membayar persentase yang sama dari pendapatannya, sehingga dapat dianggap lebih adil daripada pajak regresif. Namun, kritik terhadap pajak proposional adalah bahwa mereka dapat membebani wajib pajak dengan penghasilan rendah secara proporsional lebih besar dari penghasilan mereka. Ini karena, meskipun persentase pajak yang dibayarkan sama, jumlah nominal pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dengan penghasilan rendah dapat lebih signifikan bagi mereka daripada bagi wajib pajak dengan penghasilan tinggi.

Pajak progresif: Pajak progresif adalah sistem perpajakan di mana tarif pajaknya bertambah seiring bertambahnya pendapatan atau kemampuan finansial wajib pajak. Artinya, semakin besar pendapatan seseorang, semakin tinggi tarif pajak yang harus dibayarkan. Contoh sederhana dari pajak progresif adalah pajak penghasilan dengan tarif bertingkat. Misalnya, jika tarif pajak penghasilan untuk pendapatan di bawah Rp 50 juta per tahun adalah 5%, sedangkan untuk pendapatan di atas Rp 50 juta per tahun adalah 10%, maka seseorang dengan penghasilan sebesar Rp 40 juta per tahun hanya perlu membayar pajak sebesar Rp 2 juta ($5\% \times \text{Rp } 40 \text{ juta}$), sementara seseorang dengan penghasilan sebesar Rp 60 juta per tahun harus membayar pajak sebesar Rp 5 juta ($5\% \times \text{Rp } 50 \text{ juta} + 10\% \times \text{Rp } 10 \text{ juta}$). Dalam pajak progresif, tarif pajak bertambah seiring bertambahnya pendapatan, sehingga dapat dianggap lebih adil bagi wajib pajak dengan penghasilan rendah. Namun, kritik terhadap pajak progresif adalah bahwa mereka dapat memotivasi wajib pajak dengan penghasilan tinggi untuk mengurangi pendapatannya atau melakukan penghindaran pajak. Selain itu, terdapat juga kritik bahwa pajak progresif dapat

mengurangi insentif bagi wajib pajak dengan penghasilan tinggi untuk bekerja lebih keras atau menginvestasikan pendapatan mereka. Namun, pajak progresif masih dianggap sebagai sistem perpajakan yang paling adil di banyak negara, dan digunakan pada berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan, pajak warisan, dan pajak properti.

2. **Kecukupan:** Artinya pajak harus memberikan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Sebuah sistem pajak memenuhi ujian kecukupan jika memberikan pendapatan yang cukup untuk memenuhi permintaan akan layanan publik; jika pertumbuhan pendapatan setiap tahun cukup untuk mendanai pertumbuhan biaya layanan, dan jika ada cukup kegiatan ekonomi dari jenis yang dikenai pajak sehingga tarif dapat dipertahankan relatif rendah.
3. **Transparansi:** Artinya, wajib pajak dapat dengan mudah menemukan informasi tentang tarif sistem pajak, pembebasan, rabat dan kredit serta bagaimana uang pajak digunakan. Dengan sistem pajak yang transparan, dapat diketahui siapa yang dikenai pajak dan berapa yang mereka bayarkan, dan apa yang dilakukan dengan uang itu. Dengan kata lain, dapat diketahui siapa yang pada umumnya membayar pajak dan siapa yang diuntungkan dari pengeluaran publik.
4. **Kemudahan administrasi:** Artinya sistem perpajakan tidak terlalu rumit atau mahal baik bagi wajib pajak maupun pemungut pajak. Aturan sudah dikenal dan cukup sederhana, formulir tidak terlalu rumit, mudah untuk dipatuhi secara sukarela, negara dapat mengetahui apakah pajak dibayar tepat waktu dan benar, dan negara dapat melakukan pemeriksaan secara adil dan efisien. Biaya pemungutan pajak harus kecil dalam kaitannya dengan jumlah yang dikumpulkan.
5. **Produktivitas:** Sistem perpajakan yang baik harus memiliki otomasi, artinya penerimaan pajak cenderung tumbuh walaupun tanpa pengenaan pajak baru. Dalam hal ini, pajak atas komoditas lebih produktif daripada pajak atas kekayaan atau rejeki tak terduga. Selain itu, pajak yang dibebankan sebagai tarif lebih fleksibel dan produktif dibandingkan dengan kategori lump sum.

e. Jenis Pajak : Langsung Dan Tidak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan langsung pada pendapatan atau harta wajib pajak. Artinya, wajib pajak membayar pajak langsung dari sumber penghasilannya atau harta kekayaannya. Beberapa contoh pajak langsung antara lain pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan pajak warisan.

Sementara itu, pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan pada barang atau jasa yang dibeli atau dijual oleh wajib pajak, dan dibayar secara tidak langsung melalui harga barang atau jasa tersebut. Artinya, pajak tidak langsung dapat diserap oleh produsen, penjual, atau konsumen akhir. Beberapa contoh pajak tidak langsung antara lain pajak pertambahan nilai (VAT), pajak penjualan barang mewah, dan bea masuk.

Perbedaan mendasar antara pajak langsung dan tidak langsung adalah pada objek pajaknya. Pajak langsung dikenakan langsung pada pendapatan atau harta wajib pajak, sedangkan pajak tidak langsung dikenakan pada barang atau jasa yang dibeli atau dijual oleh wajib pajak. Selain itu, dalam pajak tidak langsung, pajak dapat diserap oleh produsen, penjual, atau konsumen akhir, sehingga memungkinkan pajak tidak langsung memiliki efek yang lebih luas pada perekonomian.

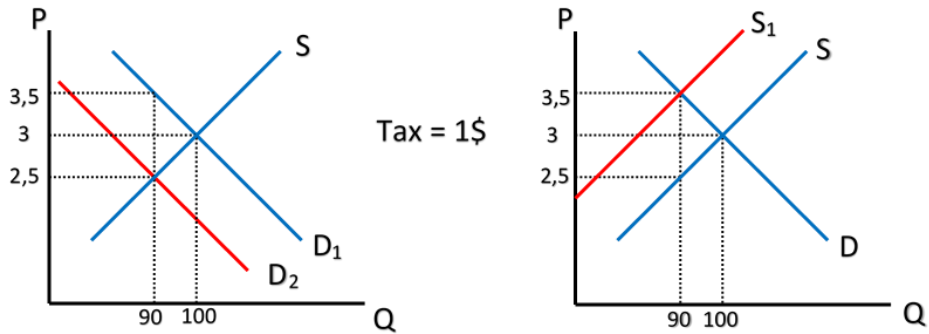
f. Elastisitas Harga dan Insiden Pajak

Price elasticity dan *incidence* (insiden) adalah dua konsep yang saling terkait dalam ilmu ekonomi. *Price elasticity* mengukur sejauh mana permintaan suatu barang atau jasa akan berubah sebagai respons terhadap perubahan harga. Dalam konteks ini, "elastisitas" merujuk pada seberapa "lentur" permintaan terhadap perubahan harga. Jika suatu produk memiliki elastisitas permintaan yang tinggi, artinya permintaan akan berubah secara signifikan ketika harga produk berubah, sementara jika elastisitas permintaan rendah, perubahan harga hanya akan sedikit mempengaruhi permintaan. Konsep ini penting untuk dipahami oleh produsen dan pemerintah karena dapat membantu mereka mengambil keputusan tentang menetapkan harga produk dan menentukan apakah suatu pajak atau subsidi akan efektif dalam mengubah perilaku konsumen.

Sementara itu, *incidence* (insiden) merujuk pada siapa yang benar-benar membayar pajak atau biaya. Dalam konteks pajak, *incidence* menunjukkan apakah beban pajak jatuh pada konsumen atau produsen. Dalam beberapa kasus, pajak mungkin membuat produsen menaikkan harga, tetapi dalam kasus lain, produsen mungkin menanggung sebagian atau seluruh beban pajak dengan mengurangi laba mereka. Hal ini dapat bergantung pada elastisitas permintaan dan pasokan suatu produk, serta kekuatan pasar dari konsumen dan produsen. Ketika konsep *price elasticity* dan *incidence* digabungkan, hal tersebut dapat membantu memahami bagaimana suatu pajak atau perubahan harga dapat memengaruhi permintaan dan penawaran suatu produk, serta siapa yang akan menanggung beban pajak atau biaya tersebut.

1. Efek pajak terhadap permintaan dan penawaran

Gambar 1
Kurva pajak terhadap permintaan dan penawaran

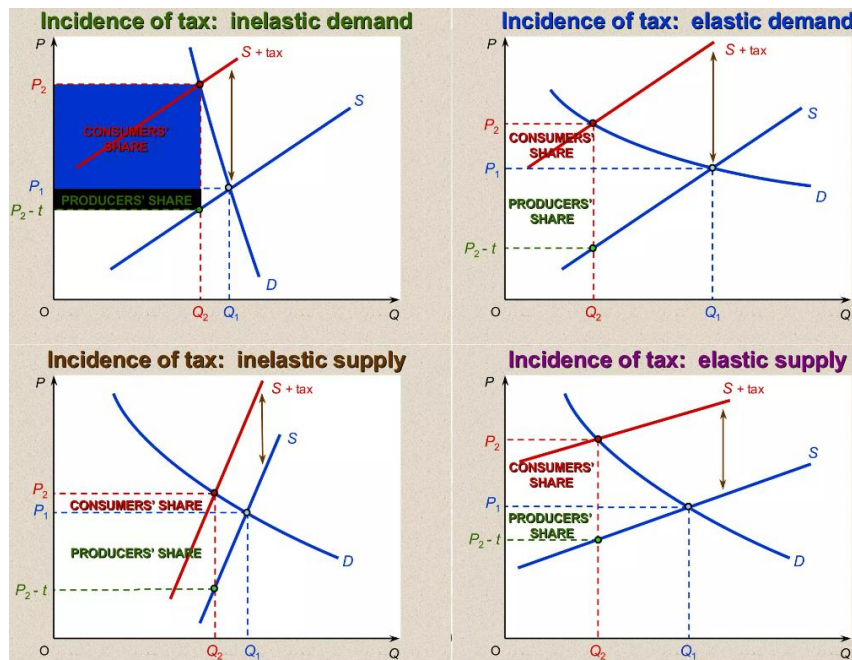


Pajak → Pembeli

Pajak → Penjual

Pembagian pajak (Incidence of tax) kepada siapakah pajak dibebankan dan berapakah beban pajak yang ditanggung oleh penjual dan pembeli itu tergantung pada elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Adapun elastisitas permintaan dan penawaran yakni sebagai berikut :

Gambar 2
Kurva elastisitas dan inelastisitas permintaan dan penawaran



Pemian pajak terjadi jika :

- Semakin elastis kurva permintaan semakin sedikit beban pajak yang ditanggung pembeli dan semakin banyak penurunan barang yang diperjualbelikan.
- Semakin inelastis kurva penawaran semakin banyak beban pajak yang ditanggung penjual dan semakin sedikit pengurangan barang yang diperjualbelikan.

g. Timbulnya Biaya

Timbulnya biaya dalam kebijakan fiskal terjadi ketika pemerintah melakukan pengeluaran untuk membiayai program atau kebijakan tertentu, seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pertahanan negara. Biaya ini dapat berupa belanja langsung seperti pembelian bahan atau jasa, atau transfer pembayaran kepada pihak lain seperti subsidi atau bantuan sosial. Selain itu, biaya juga bisa timbul dari pengurangan penerimaan negara seperti pengurangan pajak atau penerimaan yang berkurang akibat penurunan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan fiskal harus memperhitungkan dan mengelola dengan baik biaya yang timbul agar tidak mengganggu stabilitas keuangan negara dan memenuhi kebutuhan rakyat secara efektif.

h. Tujuan kebijakan fiskal

Tujuan utama dari kebijakan fiskal adalah untuk mengatur kegiatan perekonomian suatu negara melalui pengelolaan anggaran pemerintah dan perubahan dalam tingkat pajak dan pengeluaran pemerintah akan tetapi mungkin sangat berbeda dalam konteks dan cakupannya dari satu ekonomi ke ekonomi lainnya (Lativa, 2021). Perbedaan penting misalnya, mungkin ada antara ekonomi maju (kaya) dan berkembang atau berkembang (miskin), yang terakhir melibatkan sebagian besar populasi global. Oleh karena itu, dapat dilihat tujuan kebijakan fiskal dari sudut pandang negara berkembang. Di negara-negara ini, di mana sebagian besar Muslim tinggal; pemerintah berperan sangat aktif baik dalam mobilisasi sumber daya maupun pengalokasiannya untuk berbagai kegunaan. Secara singkat, tujuan utama kebijakan fiskal di negara-negara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Memobilisasi sumber daya untuk proyek-proyek sektor publik untuk memainkan peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, terutama pembangunan infrastruktur. Jika pemerintah menekan lebih atau kurang, tabungan masyarakat akan tersedia untuk sektor swasta, crowding out harus dihindari.
2. Memberikan insentif bagi sektor swasta untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses pertumbuhan. Karena sektor publik dan swasta sama-sama memanfaatkan kumpulan sumber daya yang sama.
3. Untuk mempromosikan pemerataan pendapatan dan kekayaan serta pengentasan kemiskinan, terutama melalui perluasan sektor sukarela termasuk promosi koperasi dan wakaf.
4. Membantu mengalokasikan sumber daya termasuk keuangan ke bidang-bidang prioritas sosial, terutama untuk memenuhi kebutuhan

dasar penduduk akan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.

5. Untuk mempromosikan pengembangan sumber daya manusia, dengan sasaran kaum muda dan pengangguran.
6. Menyusun pembangunan berkelanjutan menuntut langkah-langkah untuk melestarikan lingkungan.

Tujuan tersebut tidak lengkap tergantung dengan penyesuaian temporal dan spasial yang harus dilakukan. Perpajakan merupakan fenomena yang universal. Bahkan ayat yang mewajibkan zakat bagi orang beriman memberikan ruang untuk mengenakan pajak lain jika diperlukan. Jadi, di Timur Tengah pendapatan bebas pajak dan merupakan daya tarik penting bagi pekerja asing. Namun di sebagian besar negara, sumber pendapatan lain yang meningkat harus dimanfaatkan untuk pembentukan modal. Kebijakan fiskal dapat mendorong penghematan sukarela melalui pembebasan pajak; itu juga bisa memaksa tabungan melalui pembiayaan defisit seperti yang dijelaskan di bab sebelumnya. Konsesi dan kontrol pajak dapat digunakan untuk menarik modal asing. Uang dapat dipinjam di rumah dan dari luar negeri. Nyatanya, banyak negara, terutama di negara maju, hidup dengan meminjam secara berbahaya (Zubair Hasan, 2015).

i. Sukuk dan Pendapatan Publik

Kata Sukuk merupakan kata dari bahasa Arab, yaitu *shakk*. Sukuk adalah jamak dari *shak*, yang artinya “check”. Pada zaman dahulu, Alat ini dipergunakan untuk perdagangan di daerah muslim, dan berlaku pada perbankan kontemporer (Utami et al., 2023). DSN Bank Indonesia mendefinisikan sukuk sebagai surat berharga berjangka panjang yang didasari prinsip syariah yang diterbitkan oleh emiten kepada pemegang saham yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang saham berupa bagi hasil, dan membayar kembali dana sukuk pada saat jatuh tempodengan waktu yang telah ditentukan (Dewan & MUI., 2006).

Sukuk adalah sebuah instrumen keuangan syariah yang mirip dengan obligasi konvensional. Sukuk merupakan sertifikat kepemilikan atas aset atau proyek yang dimiliki oleh pemerintah atau badan usaha yang diterbitkan dalam rangka memperoleh dana dari pasar modal. Dalam hal pendapatan publik, sukuk dapat menjadi salah satu sumber pendanaan bagi pemerintah untuk membiayai proyek-proyek publik, seperti pembangunan infrastruktur. Pendapatan dari sukuk ini berasal dari pembayaran bunga atau keuntungan yang dihasilkan dari proyek atau aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk tersebut.

Dalam konteks kebijakan fiskal, sukuk dapat menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan pendapatan publik dan membiayai kegiatan pemerintah. Dengan penerbitan sukuk, pemerintah dapat mengumpulkan dana dari pasar modal tanpa harus membayar bunga seperti pada obligasi konvensional. Sebagai gantinya, investor akan memperoleh pendapatan dari keuntungan yang dihasilkan dari proyek atau aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk tersebut.

Pendapatan publik adalah semua penerimaan uang yang diperoleh pemerintah dari berbagai sumber untuk membiayai pengeluaran dan kegiatan

pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, dan program sosial lainnya. Sumber pendapatan publik bisa berasal dari pajak, retribusi, penjualan aset, bunga dari investasi, dan lain-lain. Sukuk adalah instrumen keuangan syariah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur atau kegiatan lainnya. Sukuk bekerja seperti obligasi, tetapi mengikuti prinsip-prinsip syariah yang melarang bunga dan riba. Sebaliknya, penghasilan yang diperoleh dari sukuk biasanya berasal dari keuntungan atau arus kas yang dihasilkan dari aset produktif, seperti properti atau infrastruktur.

Dalam konteks kebijakan fiskal, sukuk dapat menjadi alternatif sumber pendapatan publik yang menarik bagi pemerintah, terutama bagi negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Selain itu, sukuk juga dapat membantu negara-negara tersebut untuk membangun pasar modal syariah yang lebih kuat dan memperluas akses keuangan bagi masyarakat Muslim di seluruh dunia.

j. Pengeluaran Publik

Pengeluaran publik dalam kebijakan fiskal adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengeluaran publik biasanya mencakup berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan, dan program sosial lainnya. Pengeluaran publik merupakan salah satu instrumen penting dalam kebijakan fiskal, yang merupakan kebijakan ekonomi yang berhubungan dengan pengaturan dan penggunaan anggaran negara, termasuk pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Tujuan dari kebijakan fiskal adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil, mengendalikan inflasi, memperbaiki distribusi pendapatan, dan memperkuat stabilitas fiskal.

Pengeluaran publik dapat dibiayai oleh sumber-sumber pendapatan yang berbeda, seperti pajak, hutang, atau sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti sukuk. Kebijakan pengeluaran publik yang baik harus didasarkan pada analisis yang komprehensif dan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara.

Dalam konteks kebijakan fiskal, pengeluaran publik harus diatur dengan baik agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Pemerintah harus memperhitungkan dampak pengeluaran publik terhadap pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan stabilitas fiskal, serta memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, dan keadilan dalam penggunaan anggaran negara.

k. Islam dan Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran pemerintah. Kebijakan fiskal meliputi pengumpulan pendapatan dan pengeluaran pemerintah untuk mengatur ekonomi dan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Dalam Islam, kebijakan fiskal juga memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dibandingkan dengan kebijakan fiskal konvensional. Kebijakan fiskal dalam Islam mengikuti prinsip-prinsip syariah, seperti tidak boleh menggunakan riba atau bunga, tidak boleh memaksakan pajak yang berlebihan, dan harus memperhatikan kepentingan umum.

Dalam konteks kebijakan fiskal, Islam mendorong pemerintah untuk memperhatikan kepentingan umum dan melakukan redistribusi kekayaan untuk memperbaiki kesejahteraan sosial. Kebijakan fiskal harus digunakan untuk memperbaiki sistem ekonomi dan mewujudkan keadilan sosial. Dalam praktiknya, kebijakan fiskal dalam Islam dapat diterapkan melalui berbagai instrumen keuangan, seperti zakat, infak, sedekah, dan waqaf. Pemerintah juga dapat menggunakan instrumen keuangan syariah, seperti sukuk, untuk membiayai kegiatan pembangunan atau memperoleh pendapatan publik tanpa harus membayar bunga. Empat sumber utama pendapatan pemerintah Islam adalah pajak, zakat, jizyah, dan biaya layanan pemerintah. Sumber lainnya adalah pembiayaan ekuitas, perusahaan publik, kharaj, al-shr, wakaf dan sadaqah (Oktaviana & Harahap, 2020). Pengeluaran pemerintah dari perspektif Islam mencakup banyak bidang, permanen maupun modern, yang perlu dibiayai dari pendapatan pemerintah. Adapun sumber pendapatan yakni :

1. Perpajakan

Perpajakan merupakan sumber utama pendapatan pemerintah Islam modern. Pemerintah berhak mengenakan pajak karena bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan warga negaranya seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perumahan, penelitian dan pengembangan, serta untuk meningkatkan modal sesuai dengan tingkat status sosial ekonomi negara yang bersangkutan. Para ulama Islam klasik juga memberikan pembenaran atas pajak sebagai sumber penerimaan. Imam Malik, antara lain, dikatakan sebagai penganjur perpajakan. Dia berkata: Jika tidak ada dana dalam perbendaharaan atau kebutuhan tentara meningkat di atas kapasitas perbendaharaan, negara berhak memungut pajak atas orang kaya hingga tingkat yang memenuhi kebutuhan dengan segera dan hingga pendapatan negara. perbendaharaan muncul. (Lihat Mohammad Abu Zahra, Imam Malik, Kairo; 1963, hal. 400-01) Seharusnya tidak ada ketidakadilan yang terkait dengan kebijakan perpajakan di negara Islam, misalnya, meskipun mereka memiliki hak untuk mengenakan pajak kepada orang miskin, itu harus meminimalkan beban mereka. Sebagian besar penerimaan pajak harus berasal dari orang kaya karena mereka lebih mampu memberikan kontribusi, yaitu pajak langsung harus lebih ditekankan daripada pajak tidak langsung yang biasanya ditanggung oleh orang miskin. Demikian pula, pengenaan pajak tidak boleh mematikan insentif untuk bekerja.

2. Zakat

Zakat adalah pungutan keuangan wajib atas semua kelebihan kekayaan dan pendapatan pertanian umat Islam. Tujuannya adalah untuk memberikan dukungan keuangan kepada kategori orang tertentu seperti orang miskin dan yang membutuhkan. Itu dibebankan pada tarif yang berbeda-beda dan dikumpulkan oleh negara. Dipungut dengan tarif 2,5% untuk semua aset keuangan dan persediaan dalam perdagangan bisnis, dengan tarif 10% untuk semua hasil pertanian

hujan dan 5% untuk hasil budidaya irigasi buatan. Tarif berbeda untuk ternak yang dipelihara untuk dijual. Zakat itu seperti pajak dan mudah dikelola. Tingkat zakat tetap untuk setiap jenis, yaitu. itu seperti pajak proporsional, uang sebenarnya yang dibayarkan ke pusat zakat bervariasi dengan jumlah kekayaan/pendapatan yang dimiliki. Lagi-lagi dampaknya langsung ke penerima dan tentu saja ke pendapatan nasional suatu negara.

Zakat merupakan instrumen utama untuk memberikan jaminan sosial. memberantas kemiskinan, membatasi kesenjangan pendapatan yang berlebihan dan merangsang aktivitas ekonomi dengan mentransfer sejumlah daya beli kepada orang miskin. Ada dua jenis zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah adalah zakat atas diri sendiri yang dibayarkan selama bulan Ramadhan oleh pimpinan keluarga untuk dirinya sendiri dan tanggungannya. Zakat ini semata-mata untuk konsumsi orang miskin dan membutuhkan agar mereka bisa merayakan hari raya Idul Fitri.

Zakat al-maal adalah zakat atas harta kekayaan umat Islam yang dibayarkan setelah kepemilikan melebihi jangka waktu yang ditentukan (haul) dan harta tersebut telah mencapai batas yang ditentukan (nisab). Zakat diperuntukan untuk orang miskin (faqir) dan yang membutuhkan (miskin), dan mereka yang dipekerjakan (amil) untuk mengelola dan mengumpulkannya, dan muallaf baru (muallaf), dan mereka yang terikat (riqab) dan mereka yang berhutang (gharim). dan di jalan Allah (fisabilillah), dan jalan yang lebih jauh (ibn al-sabil), tugas yang ditetapkan oleh Allah, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana (QS Al-Taubah: 60). Selama resesi atau inflasi, mereka yang terkena dampak dapat mendekati pusat zakat untuk meminta bantuan karena mereka sekarang dapat dikategorikan sebagai fakir atau miskin. Demikian pula mereka yang memiliki hutang dapat mendekati pusat zakat.

3. Jizyah

Jizyah adalah pajak yang harus dibayar oleh orang dewasa non-Muslim yang tinggal di negara Islam pada masa awal Islam karena mereka dibebaskan dari tugas militer. Ini kemudian menjadi kebiasaan dalam budaya suku. Pemerintahan Islam memberikan keamanan bagi kehidupan dan harta benda mereka dan memastikan semua hak sosial lainnya.

Namun, jizyah secara bertahap dihapuskan seiring dengan menyebarnya kekuasaan Islam ke wilayah yang luas di dunia. Itu dihapuskan di India di bawah pemerintahan Akbar Agung yang memperoleh fatwa (dekrit agama) dari sekolah Al-Azhar untuk penghapusannya. Akbar memiliki non-Muslim dalam pasukan dan pemerintahannya, dan telah mengambil seorang putri Hindu sebagai salah satu istrinya.

4. Biaya pelayanan

Di dunia modern, banyak layanan sosial dan ekonomi disediakan oleh pemerintah dan ini sebagian ditanggung oleh biaya yang dibebankan oleh pemerintah. Namun, biaya yang dikenakan tidak boleh melebihi biaya layanan yang diberikan kepada publik dan hanya layanan yang diizinkan yang diperbolehkan.

5. Kharaj

Kharaj adalah pajak atas tanah pertanian. Itu adalah semacam biaya sewa atas tanah yang menjadi milik pemerintah Islam sebagai hasil pembebasannya oleh pasukan Muslim. Para ahli hukum Muslim setuju bahwa tanah tersebut disimpan sebagai milik umum dan dikenakan pajak sehingga umat Islam di masa depan dapat mengambil manfaat dari tanah tersebut. Tarif pajak tergantung pada kualitas tanah seperti tingkat kesuburan, kebutuhan irigasi, dll. Saat ini, tidak ada kebutuhan seperti itu dan kharaj telah menjadi sumber pendapatan negara yang tidak berfungsi.

6. Al-Ushr

Al-ushr adalah pajak komersial atau bisnis yang mirip dengan pajak ekspor dan impor. Ini dikumpulkan dari tiga pedagang yang berbeda. Untuk pedagang dari luar negeri tarifnya 10% setahun, untuk pedagang lokal non muslim tarifnya 5% setahun dan untuk pedagang lokal muslim tarifnya 2,5% setahun.

Secara keseluruhan, kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip syariah harus dijadikan pedoman dalam mengambil kebijakan fiskal dan memperhatikan kepentingan umum dalam pengelolaan anggaran pemerintah.

I. Pengeluaran Publik Dan Islam

Pengeluaran publik dalam konteks Islam adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, seperti pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan program sosial lainnya. Pengeluaran publik dalam Islam harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien.

Dalam Islam, pemerintah dianggap sebagai wakil dari umat Islam dalam menjalankan urusan publik dan memastikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat terpenuhi. Oleh karena itu, pengeluaran publik dalam Islam harus mengutamakan kepentingan umum dan tidak hanya kepentingan individu atau kelompok tertentu. Selain itu, pengeluaran publik dalam Islam juga harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah, seperti tidak mengandung unsur riba dan tidak merugikan masyarakat.

Dalam konteks kebijakan fiskal, pengeluaran publik menjadi salah satu instrumen yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan ekonomi dan sosial. Pengeluaran publik dapat digunakan untuk merangsang

pertumbuhan ekonomi, memperbaiki infrastruktur, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membantu mengatasi masalah sosial. Dalam Islam, pengeluaran publik harus diatur secara hati-hati untuk memastikan bahwa penggunaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak merugikan masyarakat. Dalam praktiknya, pengeluaran publik dalam kebijakan fiskal dapat dilakukan melalui berbagai instrumen, seperti belanja pemerintah, subsidi, dan program bantuan sosial. Namun, pengeluaran publik harus dikelola dengan hati-hati untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaannya serta meminimalkan risiko penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi. Oleh karena itu penting bahwa setiap keputusan tentang pengeluaran publik dibuat dengan cara yang demokratis yang memerlukan konsultasi dengan orang-orang yang relevan untuk kepentingan bersama karena itu adalah uang rakyat, yang dipercayakan kepada pemerintah.

Sebuah pemerintahan Islam tidak dapat memulai proyek apapun yang dilarang oleh Syariah atau yang dapat membahayakan lingkungan Islam dan kepentingan umum. Di bawah ini tercantum delapan kepala pengeluaran pemerintah tetap dari sebuah negara Islam:

1. Pertahanan.
2. Hukum dan ketertiban.
3. Keadilan
4. Administrasi publik.
5. Pemenuhan kebutuhan dasar
6. Kegiatan dakwah
7. Memerintahkan perilaku yang benar dan melarang yang salah, dan
8. Pemenuhan kewajiban sosial ketika sektor swasta gagal melakukannya.

Ada lagi lima kepala pengeluaran penting seorang Islam di era modern. Ini adalah:

1. Perlindungan lingkungan
2. Pembangunan ekonomi
3. Penelitian ilmiah
4. Subsidi untuk sektor prioritas, dan
5. Kebijakan pengeluaran dan stabilisasi.

Harus dicatat di sini bahwa: pengeluaran publik dalam negara Islam harus prioritas rendah, yaitu yang diperlukan (dharuriah), kebutuhan (hajiah), yang terpuji (tahsiniah) dan kemewahan (kamaliah). Yang perlu adalah untuk diberikan prioritas diikuti dengan kebutuhan. Kebutuhan diutamakan terpuji. Fungsi pengeluaran negara Islam diklasifikasikan Ketiga kelompok. Ini adalah:

1. Fungsi pengeluaran yang ditugaskan oleh syariah secara permanen.
2. Fungsi pembelanjaan yang diturunkan dari syariat berdasarkan institusi ijtihad untuk situasi sekarang, dan
3. Fungsi pembelanjaan yang ditugaskan kepada pemerintah oleh rakyat melalui proses konsultasi.

3. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif. Metode yang digunakan menggunakan metode studi literatur. Alasan peneliti menggunakan studi literatur membantu dalam memahami konsep, teori, dan temuan terkait topik penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, laporan, dan dokumen lainnya.

4. Hasil dan Pembahasan

Secara singkat, penelitian ini memberikan penjelasan tentang peran pemerintah dan ekonomi dalam kebijakan fiskal, serta pentingnya pengelolaan sumber pendapatan negara. Pemerintah dapat mengubah pengeluaran dan penerimaan negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi, sementara ekonomi memberikan informasi yang membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan fiskal yang tepat. Sumber pendapatan negara harus dikelola dengan baik untuk menjamin kestabilan ekonomi negara dan mencapai tujuan-tujuan ekonomi yang ditetapkan pemerintah.

5. Kesimpulan dan Saran

Kebijakan fiskal memainkan peran penting dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran negara untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial. Dalam kebijakan fiskal, pemerintah dapat mengambil tindakan seperti menaikkan atau menurunkan pajak, menambah atau mengurangi pengeluaran, serta memberikan subsidi atau bantuan sosial. Namun, kebijakan fiskal juga bisa menimbulkan biaya bagi negara. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan kebijakan fiskal yang bijak dan bertanggung jawab agar tercapai tujuan ekonomi dan sosial yang diinginkan, tanpa membahayakan stabilitas keuangan negara.

Daftar Pustaka

- Dewan, H. F., & MUI., N. (2006). *Dewan Syariah Nasional MUI-Bank Indonesia. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Edisi Revisi.*
- Imam Turmudi. (2019). Kajian Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter dalam Islam. *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 74–90.
- Lativa, S. (2021). Analisis Kebijakan Fiskal Indonesia Pada Masa Pandemi COVID-19 dalam Meningkatkan Perekonomian. *Jurnal Ekonomi*, 2021(3), 15.
- Najicha, F. U. (2022). Peranan Hukum Pajak sebagai Sumber Keuangan Negara pada Pembangunan Nasional dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 169. <https://doi.org/10.35308/jic.v6i1.4568>
- Nida'ul Haque, D. P. (2022). Analisis Sumber Pendapatan Negara dan Alokasi Belanjanya Dalam Konteks Keuangan Publik Islam Era Kekinian di Malaysia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 9(No. 2), 357–370.
- Oktaviana, M., & Harahap, S. B. (2020). Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah Dan Khulafarasyidin. *Nazharat: Jurnal Kebudayaan*, 26(01), 283–307. <https://doi.org/10.30631/nazharat.v26i01.29>
- Putri, I. A., & Nasution, E. O. A. (2022). Kebijakan Moneter Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Studia*

- Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 166.
<https://doi.org/10.30821/se.v8i1.13778>
- Rahma, H., Fauzi, A., Juanda, B., & Widjojanto, B. (2021). Fenomena Natural Resource Curse dalam Pembangunan Wilayah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 21(2), 148–163.
<https://doi.org/10.21002/jepi.v21i2.1358>
- Utami, T., Angraini, D., & Annisa, D. (2023). Pengaruh Pendapatan Bunga, Secure Dan Maturity Terhadap Rating Sukuk Korporasi Dengan Produktivitas Sebagai Pemoderasi. *Keunis*, 11(1), 73.
<https://doi.org/10.32497/keunis.v11i1.3948>
- Zubair Hasan. (2015). *Economic with Islamic Orientation* (Oxford Fajar Sdn. (ed.)). Oxford University Press.